



Penuhi Panggilan KPK dan Bicara Apa Adanya

● 6 PNS Pemkot Yogyakarta Jalani Pemeriksaan

YOGYA, TRIBUN - Setelah 20 hari penahanan terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dkk terkait kasus dugaan suap penerbitan IMB, kini KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap enam PNS Pemkot Yogyakarta.

"Hari ini pemeriksaan saksi dugaan kasus

suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk tersangka HS dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan resminya, Rabu (22/6).

● ke halaman 11

Penuhi Panggilan

● Sambungan Hal 1

Pemeriksaan itu dilakukan di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Mereka yang diperiksa berasal dari Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dan Dinas PMPT-SP Kota Yogyakarta.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi mengaku sudah mengetahui soal pemanggilan deretan ASN-nya oleh lembaga antirasuah tersebut.

Menurutnya, pemanggilan itu tidak perlu dipermasalahkan, lantaran statusnya adalah saksi, dan proses penyidikan tengah ditempuh KPK.

"Iya, teman-teman memang ada yang dipanggil KPK ke Jakarta. Pemeriksaan itu kan

memang bagian dari proses penyidikan yang masih berlangsung," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Sumadi pun mendorong para ASN yang menjalani pemeriksaan, supaya memberikan informasi segamblang mungkin kepada KPK.

Dengan begitu upaya pengusutan kasus soal perizinan untuk pembangunan apartemen tersebut benar-benar terang, dan bisa segera dituntaskan.

"Makanya, saya dorong teman-teman, untuk memenuhi panggilan itu, dan memberikan informasi. Saya tekankan ke teman-teman itu, sampaikan apa adanya, sepengetahuan panjenengan semua, itu saja sudah," kata Sumadi.

"Kalau ada yang ditutup-

tutupi, itu kan risikonya dia sendiri, wong teman-teman KPK pasti sudah mempunyai data yang komplet. Jadi, sekarang tinggal mencocokkan saja kan, istilahnya, dengan memanggil saksi," imbuhnya.

Sumadi pun sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada KPK. Ketika lembaga antirasuah membutuhkan informasi tambahan untuk penyidikan kasus tersebut, Pemkot pun siap sedia memberikan kesaksiannya.

Ditegaskannya, dukungan penuh diberikannya untuk KPK, supaya pengusutan polemik perizinan apartemen Royal Kedhaton itu semakin terang.

Sumadi menyatakan, hal tersebut, merupakan bagian dari komitmen Pemkot dalam menegakkan ketentuan pera-

turan perundangan.

"Tapi, saya kan tidak bisa menjustifikasi, apakah ada yang terlibat lagi, atau tidak. Ini bagian dari proses penyidikan yang dilakukan KPK. Hanya saja, saya berharap, teman-teman tidak ada (yang terlibat)," tandasnya.

Seperti diwartakan, mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Jumat (3/6) lalu.

Selain Haryadi Suyuti, turut diamankan KPK Vice Presiden PT Summarecon Agung berinisial ON.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Yogyakarta NWH, dan Sekretaris Pribadi sekaligus ajudan Haryadi Suyuti inisial TBY sebagai tersangka. **(nda/aka)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|--------------|-------|-----------------|
| 1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005